

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus mengalami perkembangan seiring diberlakukannya standar akuntansi berbasis internasional di Indonesia. *International Financial Reporting Standards* (IFRS) atau standar pelaporan keuangan internasional mulai diadopsi di Indonesia pada tahun 2008 yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Penerapan standar pelaporan keuangan ini guna mengurangi diversitas akuntansi antara masing-masing negara. Semakin banyak standar yang sama, semakin kecil diversitas, atau, dengan kata lain, standar-standar akuntansi yang digunakan di negara-negara di dunia ini semakin harmonis. Inilah yang diupayakan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) dengan menyusun set standar inti yang berkualitas tinggi yang diharapkan dapat diterima oleh semua negara, yang merupakan kompromi dari standar-standar yang sudah ada (Sunardi & Sunyoto, 2015, hlm. 91).

Sejak awal tahun 1960-an, telah dirasakan bahwa arus modal lintas negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan hal itu maka semakin dibutuhkan pola laporan keuangan yang merupakan sumber informasi keuangan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan ekonomi yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Hakikat pengambilan keputusan investasi adalah pemilihan alternatif investasi yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Karena pemilihan hanya dapat dilaksanakan jika dapat dilakukan perbandingan, maka untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat diperlukan laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang komparabel (dapat dibandingkan). Dengan kata lain, komparabilitas laporan keuangan merupakan prasyarat bagi pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Semakin tinggi komparabilitas, semakin berkualitas keputusan yang diambil (Sunardi & Sunyoto, 2015, hlm. 93).

Diversitas akuntansi mempunyai pengaruh negatif terhadap komparabilitas informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan. Semakin tinggi diversitas akuntansi, semakin rendah komparabilitas informasi keuangan yang

dihasilkan, dan ini berarti semakin tebal tembok penghalang yang merintang arus dana internasional, dan dengan demikian berarti semakin besar upaya yang diperlukan untuk mengatasi rintangan tersebut. Ini berarti semakin besar biaya yang harus dikeluarkan (Sunardi & Sunyoto, 2015, hlm. 93).

Indonesia memutuskan untuk melaksanakan konvergensi terhadap IAS/IFRS pada tahun 1994. Sampai dengan disusunnya Standar Akuntansi Keuangan Januari 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan 57 standar dengan rincian: 28 standar mengacu IAS/IFRS; 20 standar mengacu PABU AS; 1 standar mengacu standar akuntansi Bahrain; dan 8 standar dibuat sendiri. Pada tahun 1999, Asean Development Bank menyatakan bahwa dalam hal substansinya, 90% pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) sama dengan IAS. Jadi, sampai saat ini PSAK lebih banyak berkiblat pada IAS (Sunardi & Sunyoto, 2015, hlm. 107).

Salah satu PSAK yang mengalami perubahan adalah PSAK 16 tentang aset tetap mengenai pengukuran setelah pengakuan awal. Pada PSAK 16 (Revisi 1994), aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Revaluasi aset tidak diperkenankan dilakukan pada PSAK 16 (Revisi 1994). Menurut PSAK 16 (Revisi 2007), aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dalam pencatatan akuntansinya, biasanya aset tetap dicatat ketika diperoleh oleh perusahaan sehingga harga yang dicatat pun sejumlah harga perolehan aset tetap tersebut. Lalu setiap tahunnya akan terdapat nilai penyusutan karena telah dipakai atau dipergunakannya aset tetap tersebut. Memang secara logika, barang yang telah terpakai nilainya pasti akan menurun, dan hal ini diterapkan dalam perlakuan pencatatan akuntansi pada perusahaan.

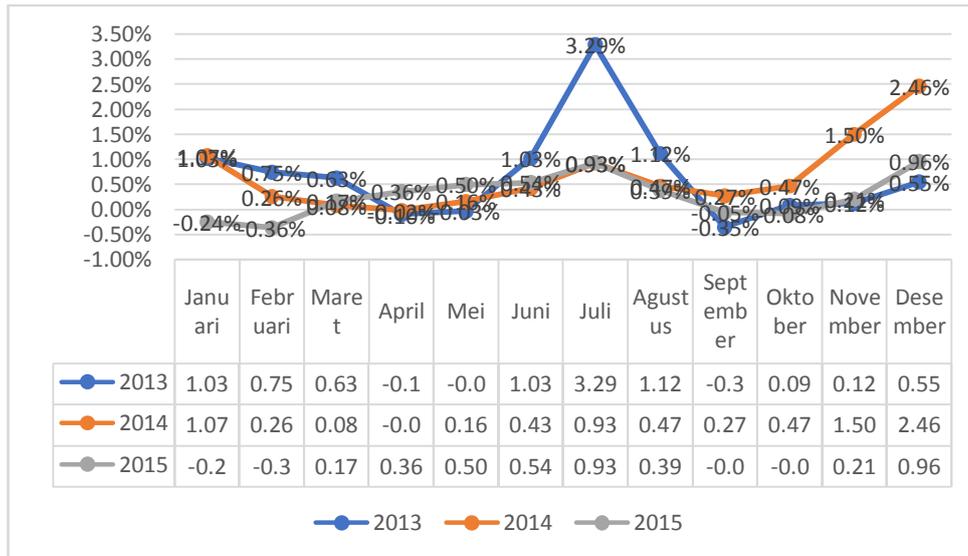
Namun pada kenyataannya, tidak semua aset tetap nilainya akan menurun dan habis sesuai dengan nilai ekonomis yang diperkirakan pada saat memperoleh aset tersebut. Beberapa aset tetap malah nilainya bisa mengalami kenaikan terus menerus. Juga ada beberapa aset tetap yang nilai ekonomisnya lebih lama dari

nilai ekonomis perkiraan. Namun hal ini tidak dapat tersajikan dengan baik dalam laporan keuangan perusahaan karena penyajian laporan keuangan terikat dengan aturan-aturan.

Laporan keuangan merupakan hal vital yang diterbitkan oleh perusahaan. Laporan keuangan ini berguna sebagai alat komunikasi yang menginformasikan kondisi keuangan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Oleh karena itu laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya karena ini akan berpengaruh terhadap banyak hal. Laporan keuangan yang menunjukkan perusahaan dalam posisi yang baik akan lebih menguntungkan, sebab hal ini dapat menarik minat investor dan perusahaan dapat dipercaya oleh kreditur untuk mendapatkan pinjaman untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Pencatatan nilai perolehan pada aset tetap bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah jika dilihat pada masa sekarang. Penilaian yang lebih tinggi terhadap aset bisa disebabkan karena pembebanan biaya penyusutan yang terlalu rendah, sedangkan penilaian yang lebih rendah dapat disebabkan karena naiknya harga aktiva tetap tersebut dipasaran, dan ini dapat terjadi karena berbagai faktor diantaranya karena inflasi atau turunnya nilai mata uang (Sherlita, Sari, & Permana, 2012).

Nilai aset tetap perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu inflasi dan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Meningkatnya harga-harga di pasaran menyebabkan nilai dari suatu aset tetap yang dimiliki oleh entitas usaha menjadi tidak wajar. Berikut tabel yang menunjukkan tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2013-2015.



Sumber : *bps.go.id* (data diolah)

Grafik1.1
Tingkat Inflasi Berdasarkan Bulan
Periode 2013-2015

Indonesia terus menerus mengalami inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2013 adalah 8,38%, lalu tahun 2014 dan 2015 Indonesia masih mengalami inflasi sebesar 8,36% dan 3,35% dilihat dari grafik inflasi di atas maka dapat dipahami mengapa nilai aset tetap yang tertera sebesar harga perolehan tidak lagi sama nilainya jika dinilai beberapa tahun kemudian karena nilai uang yang tidak pernah stabil. Nilai uang selalu berubah seiring berjalannya waktu. Baik itu menjadi semakin lemah atau semakin kuat. Maka lebih baik entitas melakukan penilaian ulang terhadap aset tetap yang dimilikinya agar nilai-nilai yang tersaji pada laporan keuangan lebih *reliable*.

Syakur (2015, hlm. 289) menyatakan bahwa adanya inflasi ekstrem (*hyper inflation*), yaitu keadaan di mana harga barang cenderung naik secara signifikan, dan bersifat permanen yang dapat mendorong terjadinya inflasi tahap berikutnya secara cepat. Keadaan demikian mengakibatkan nilai tercatat aktiva tetap sudah tidak dapat lagi mencerminkan nilai perusahaan, yaitu dalam keadaan terlalu rendah dari nilai riilnya. Penilaian kembali diperlukan untuk menaikkan nilai tercatat aktiva agar sesuai dengan harga riilnya ini disebut revaluasi/appraisal.

PSAK 16 (revisi 2007) tentang aset tetap yang mulai berlaku efektif pada januari 2008 menggantikan PSAK no. 16 (1994) tentang aktiva tetap dan lain-lain.

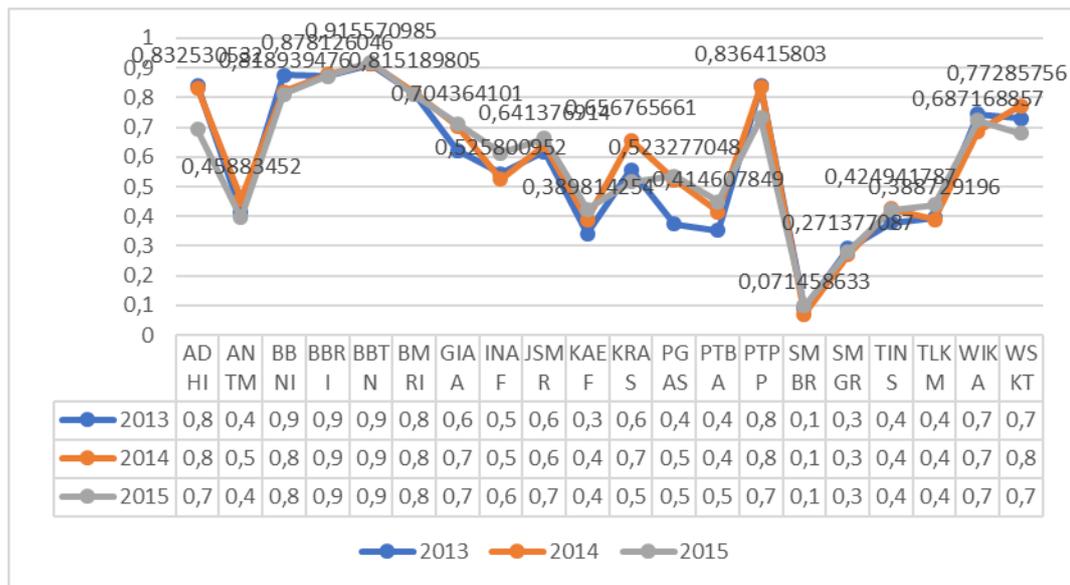
PSAK 16 (Revisi 2007) memiliki beberapa perbedaan dengan PSAK 16 (1994). Perbedaan yang signifikan dari PSAK 16 (revisi 2007) dengan sebelumnya adalah pada pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap. Dalam PSAK No. 16 (revisi 2007), perusahaan memiliki opsi untuk memilih model revaluasi atau model biaya dalam pengukuran aset tetap. Sedangkan pada PSAK 16 sebelumnya, perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan model biaya dalam pengukuran aset tetap. Penggunaan model revaluasi sebagai pengukuran nilai aset setelah pengakuan awal terlihat lebih relevan karena model revaluasi mencatat nilai sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mendorong perusahaan milik negara untuk melakukan revaluasi aset sebagai salah satu langkah memperkuat neraca keuangan dari sisi modal. Menurut Rini, selama ini sebagian besar aktiva tetap BUMN masih "undervalued", karena dicatat berdasarkan nilai perolehan beberapa dekade yang lalu. Dan pencatatan nilai yang lebih rendah dari nilai pasar ini mengakibatkan leverage BUMN menjadi lebih rendah dari yang semestinya (*antaranews.com*). Sehingga setelah BUMN memilih untuk melakukan model revaluasi, diharapkan BUMN akan mendapatkan utang untuk menunjang aktivitas perusahaan dan dapat dipercaya oleh kreditur dengan tingginya nilai aset yang dimiliki setelah *appraisal*. Karena hal ini, banyak BUMN yang telah maupun akan melakukan revaluasi agar nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan mencerminkan nilai wajar masa kini.

Revaluasi juga pernah menyelamatkan salah satu BUMN, yaitu PT. PLN (Persero). Hal ini dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang mengatakan bahwa ketika itu BUMN Kelistrikan ini mencatatkan modal negatif Rp 9 triliun, sedangkan aset hanya Rp 50 triliun. Secara teknis, keadaan PLN saat itu sudah bangkrut. Pemerintah menganjurkan PLN untuk melakukan revaluasi dan hasilnya aset PT. PLN (Persero) menjadi Rp 250 triliun. Selisihnya dimasukkan ke modal dari negatif menjadi Rp 104 triliun. Dan hal ini merupakan pertama kali BUMN Indonesia diselamatkan oleh revaluasi (*bisnis.liputan6.com*).

Pada akhir tahun 2015, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu), Sonny Loho, menyatakan bahwa instansinya telah menerima

daftar 79 BUMN yang bersedia melakukan revaluasi aset dari total 119 BUMN yang ada di Indonesia (*pengampunanpajak.com*). Dan pada periode 2013-2015, dari 20 BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 7 perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap sepanjang tahun 2013; 10 perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap sepanjang tahun 2014; dan 15 perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap sepanjang tahun 2015.



Sumber: Data diolah

Grafik1.2
Tingkat Utang BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2013-2015

BUMN memiliki tingkat hutang yang fluktuatif namun tidak begitu signifikan selama tahun 2013-2015. Hal ini menunjukkan BUMN memerlukan utang sebagai bantuan dana dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Melihat situasi ini, peneliti mengambil faktor negosiasi *debt contracts* sebagai batas masalah yang akan diteliti dikarenakan BUMN perlu mendapatkan kepercayaan kreditur bahwa perusahaannya mampu membayar utang dimiliki. Faktor negosiasi *debt contract* yang menurut Seng dan Su (2010) terdiri dari *leverage* dan arus kas operasi.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, beberapa faktor yang mempengaruhi manajer perusahaan melakukan revaluasi aset tetap diantaranya adalah pengeluaran saham bonus, utang, perjanjian pinjaman,

takeover perusahaan, arus kas operasi, deplesi, likuiditas, ukuran perusahaan, prospek pertumbuhan perusahaan, keberadaan aset yang direvaluasi dan pola revaluasi sebelumnya (Barlev, Fried, Haddad, & Livnat, 2007)

Dua faktor utama negosiasi *debt contracts* yang dapat mempengaruhi revaluasi aset tetap seperti yang dilakukan Seng dan Su (2010) dalam penelitian sebelumnya adalah tingkat *leverage* dan arus kas operasi. Menurut Scott (2009), perusahaan yang mempunyai kontrak utang lebih tinggi memungkinkan manajer menggunakan prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau aset perusahaan. Dengan dilakukannya revaluasi aset tetap diharapkan nilai aset perusahaan akan meningkat, oleh karena itu perusahaan yang mempunyai kontrak utang lebih tinggi cenderung untuk melakukan revaluasi aset tetap yang diharapkan dapat meningkatkan nilai aset perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulistia dkk (2015) mengenai Pengaruh *Leverage*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan *Fixed Asset Intensity* Terhadap Revaluasi Aset Tetap. Penelitian inimenunjukkan bahwa semua faktor, yaitu *leverage*, arus kas operasi, ukuran perusahaan, dan *asset intensity* tidak mempengaruhi pilihan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Egy dan Erly (2012) yang menguji faktor tingkat *leverage*, tingkat hutang jaminan, penurunan arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran perusahaan menemukan bahwa faktor-faktor tersebut di atas tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Tunggul Natalius dan Aria Farahmita (2015) mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Revaluasi Aset Tetap pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Saham Beberapa Negara ASEAN menemukan bahwa Intensitas aset tetap, *leverage*, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap keputusan revaluasi aset tetap sementara ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Black, Sellers, dan Manly (1998) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage*, *book-to-equity*, dan likuiditas terhadap revaluasi aset tetap pada tiga negara sekaligus, yaitu Inggris, Australia dan Selandia Baru menemukan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi dan rasio *book-to-equity* yang tinggi cenderung memilih menggunakan metode revaluasi, sedangkan perusahaan

dengan likuiditas operasi yang tinggi tidak akan memilih metode revaluasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tay (2009) di Selandia Baru menemukan pengaruh yang signifikan negatif antara *gearing* terhadap pilihan metode revaluasi. Hal serupa juga ditemukan oleh ditemukan pada variabel arus kas operasi. Sementara perusahaan dengan ukuran yang besar dan intensitas aset tetap yang tinggi cenderung memilih metode revaluasi. Faktor lain yang diteliti adalah intensitas aset tetap.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Leverage dan Arus Kas Operasi Terhadap Revaluasi Aset Tetap (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh rasio *leverage* terhadap revaluasi aset tetap pada BUMN yang listing di Bursa efek Indonesia tahun 2013-2015?
2. Apakah terdapat pengaruh arus kas operasi terhadap revaluasi aset tetap pada BUMN yang listing di Bursa efek Indonesia tahun 2013-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap revaluasi aset tetap.
2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap revaluasi aset tetap.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan juga pengetahuan mengenai revaluasi aset tetap dan faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi dan dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan revaluasi aset tetap.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan / Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan mengenai kebijakan akuntansi aset tetap jika manajemen akan menggunakan model revaluasi dalam pengukuran nilai aset tetapnya di masa depan.

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat membuat pengguna laporan keuangan lainnya mengetahui faktor apa yang mempengaruhi revaluasi aset tetap. Sehingga kedepannya membantu memberikan gambaran dalam pengambilan keputusan.